Mampang
Kuningan
Manteng
200 M

BAB IV

OPTIMISME PEMULIHAN EKONOMI

Pemulihan ekonomi Indonesia yang telah menguat pada semester II 2020 diprakirakan berlanjut pada 2021. Kemajuan penanganan Covid-19 termasuk penggunaan vaksin, pemulihan ekonomi global, stimulus kebijakan makroekonomi, serta berbagai upaya penajaman strategi kebijakan mendukung optimisme penguatan ekonomi tersebut. Sinergi kebijakan antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas terkait yang terus diperkuat juga mendukung prospek pemulihan ekonomi nasional. Di jangka menengah, ekonomi Indonesia diprakirakan kembali dalam lintasan meningkat, didukung perbaikan ekonomi global dan peningkatan produktivitas domestik sebagai dampak reformasi struktural, termasuk percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, serta penguatan UMKM.

Perekonomian Indonesia 2021 diprakirakan terus membaik didukung kemajuan penanganan Covid-19 termasuk vaksinasi, pemulihan ekonomi global, serta stimulus dan penguatan kebijakan. Perkembangan sejumlah indikator dini hingga akhir Desember 2020 mengonfirmasi optimisme perbaikan ekonomi global, yang didukung peningkatan mobilitas dan stimulus kebijakan di berbagai negara. Secara umum, kecepatan pemulihan ekonomi global akan dipengaruhi oleh kemajuan penanganan Covid-19, terutama implementasi vaksinasi; peningkatan mobilitas; besaran dan kecepatan stimulus kebijakan; kondisi sektor keuangan dan korporasi; serta struktur perekonomian suatu negara. Di negara maju, pemulihan ditopang terutama oleh ekonomi AS yang terus membaik sejalan dengan stimulus kebijakan yang berlanjut, meskipun peningkatan kasus Covid-19 tetap menjadi perhatian. Di negara berkembang, ekonomi Tiongkok diprakirakan pulih tercepat sebagai dampak dari stimulus fiskal yang besar dan penyebaran Covid-19 yang berkurang, sedangkan perbaikan ekonomi negara berkembang lainnya belum terlalu kuat. Perekonomian global pada 2021 diprakirakan tumbuh di kisaran 5%, meningkat setelah terkontraksi sekitar 3,8% pada 2020. Perbaikan ekonomi dunia mendukung peningkatan volume perdagangan dan harga komoditas. Ketidakpastian pasar keuangan global juga mereda sehingga mendorong aliran modal kembali masuk ke negara berkembang dan menopang penguatan mata uangnya.

"Perekonomian Indonesia 2021 diprakirakan terus membaik didukung kemajuan penanganan Covid-19 termasuk vaksinasi, pemulihan ekonomi global, serta stimulus dan penguatan kebijakan"

Perekonomian domestik yang mulai membaik pada semester II 2020 diprakirakan terus menguat pada 2021. Perkembangan sejumlah indikator dini hingga akhir Desember 2020 mengonfirmasi arah pemulihan tersebut, seperti perbaikan *Purchasing Manager's Index* (PMI) manufaktur, dan keyakinan serta ekspektasi konsumen yang menguat terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan kegiatan usaha. Prospek kecepatan pemulihan akan banyak dipengaruhi vaksinasi dan disiplin masyarakat dalam penerapan protokol Covid-19, yang menjadi prasyarat pemulihan ekonomi nasional tersebut. Selain itu, berbagai kebijakan untuk medorong pemulihan ekonomi perlu dilakukan, yaitu (i) pembukaan sektor-sektor produktif dan aman secara nasional maupun di masing-masing daerah, (ii) percepatan realisasi fiskal, (iii) peningkatan kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, (iv) keberlanjutan stimulus moneter dan makroprudensial, serta (v) percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya terkait pengembangan UMKM, juga menjadi faktor yang memengaruhi prospek pemulihan perekonomian domestik. Dengan berbagai faktor pendukung tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 diperkirakan meningkat di kisaran 4,8-5,8%.

Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dan otoritas terkait dalam menempuh berbagai langkah kebijakan lanjutan untuk mendukung perbaikan ekonomi ke depan. Bank Indonesia akan terus mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga terkendalinya inflasi, stabilitas nilai tukar Rupiah, serta dukungan atas stabilitas sistem keuangan. Koordinasi yang erat dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus diperkuat sehingga dapat makin mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial akomodatif akan dilanjutkan, yang dalam implementasinya akan

Keterangan: Proyek Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat

terkoordinasi erat dengan stimulus fiskal Pemerintah dan kebijakan mendorong kredit/pembiayaan dari OJK sehingga dapat terus mendorong permintaan dan pertumbuhan ekonomi ke depan. Digitalisasi sistem pembayaran dan pendalaman pasar uang juga dipercepat untuk makin mengembangkan ekonomi keuangan digital, termasuk UMKM dan ekonomi-keuangan syariah. Implementasi kebijakan ini akan terus diperkuat dengan sinergi yang erat dengan Pemerintah, KSSK, perbankan, lembaga *fintech*, dunia usaha, dan masyarakat luas sehingga meningkatkan kontribusi ekonomi keuangan digital dalam pemulihan ekonomi nasional.

Dalam jangka menengah, perekonomian Indonesia diprakirakan akan kembali pada lintasan yang meningkat, ditopang oleh membaiknya ekonomi dunia serta menguatnya sinergi kebijakan dan reformasi struktural. Prospek ekonomi global diprakirakan terus membaik pada 2022 sejalan tekanan Covid-19 yang berkurang dan dampak positif stimulus kebijakan di banyak negara. Prospek ekonomi global ini menopang perbaikan ekspor Indonesia yang kemudian meningkatkan aktivitas produksi, investasi, dan konsumsi. Perbaikan iklim berusaha sebagai dampak implementasi UU Cipta Kerja juga akan mendukung perbaikan investasi. Sinergi kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah dan otoritas terkait yang terus diperkuat juga akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Dengan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi domestik diprakirakan berada di kisaran 5,4-5,9% pada 2022. Dalam periode selanjutnya, pemulihan ekonomi global yang terus berlanjut akan terus menopang peningkatan kinerja sektor eksternal Indonesia. Produktivitas ekonomi domestik juga diprakirakan meningkat sebagai hasil reformasi struktural yang terus ditempuh, termasuk akselerasi ekonomi dan keuangan digital serta penguatan UMKM. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprakirakan terus meningkat hingga mencapai kisaran 5,5-6,1% pada 2025, dan bergerak menuju lintasan menjadi negara maju berpendapatan tinggi pada 2045.

4.1.

Perekonomian Global Pulih pada 2021

Optimisme perbaikan ekonomi global yang terjadi pada semester II 2020 diprakirakan terus berlanjut pada 2021. Berbagai indikator dini terus menunjukkan perbaikan ekonomi di berbagai negara. Kenaikan PMI manufaktur dan jasa berlanjut di AS dan Tiongkok. Keyakinan konsumen dan bisnis terus membaik di AS, Tiongkok, dan kawasan Eropa, ditopang oleh prospek ekonomi yang membaik serta kemajuan pengujian vaksin dan rencana implementasinya. Tingkat pengangguran mulai menurun secara bertahap di AS, kawasan Eropa, dan Tiongkok seiring dengan kinerja ekonomi yang membaik. Perbaikan kinerja berbagai indikator tersebut diprakirakan akan terus meningkat pada 2021. Ketidakpastian pasar keuangan global juga diprakirakan menurun dan mendorong penguatan berbagai mata uang negara berkembang. Prospek ekspor semakin membaik sejalan dengan kenaikan permintaan dan harga komoditas global. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi global diprakirakan akan berada di kisaran 5,0% pada tahun 2021 (Tabel 4.1). Namun demikian, beberapa faktor tetap mendapat perhatian karena dapat memengaruhi prospek ekonomi global tersebut seperti perkembangan kasus Covid-19, efektivitas implementasi vaksin, dan tensi perdagangan AS – Tiongkok.

Tabel 4.1. Ekonomi Global: Pertumbuhan, Volume Perdagangan, Harga Komoditas

(%, yoy)

	2018	2019	2020*	2021*
PDB Dunia	**3,6**	**2,8**	**-3,8**	**5,0**
Negara Maju	**2,2**	**1,6**	**-4,9**	**4,0**
Amerika Serikat	2,9	2,2	-3,8	4,3
Eropa	1,9	1,3	-7,2	5,0
Jepang	0,3	0,7	-5,7	2,5
Negara Berkembang	**4,5**	**3,7**	**-2,9**	**5,6**
Tiongkok	6,7	6,1	2,1	7,8
India	6,1	4,2	-8,8	8,2
Amerika Latin	1,1	0,0	-7,5	3,1
Volume Perdagangan Dunia	**3,8**	**-0,4**	**-6,3**	**4,4**
Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia	**-2,8**	**-3,0**	**-5,8**	**4,0**

Keterangan: *Proyeksi Bank Indonesia
Sumber: World Economic Outlook Database Oktober 2020

Pemulihan ekonomi global didukung prakiraan implementasi vaksinasi, pembukaan ekonomi, dan berlanjutnya stimulus kebijakan. Ketersediaan vaksin diprakirakan akan terpenuhi pada paruh pertama 2021 untuk 68% penduduk dunia, sehingga diharapkan dapat mendorong perbaikan mobilitas, keyakinan konsumen, dan keyakinan dunia usaha. Sementara itu, stimulus kebijakan fiskal dan moneter yang diprakirakan terus berlanjut akan semakin mendorong pemulihan ekonomi di banyak negara (Grafik 4.1 dan Grafik 4.2). Pemerintah AS akan melanjutkan stimulus untuk asuransi pengangguran, penundaan sebagian pembayaran pajak, pencegahan penggusuran, dan keringanan pembayaran pinjaman untuk pelajar. Pemerintah Jepang juga menyiapkan stimulus lanjutan melalui *supplementary budget* ketiga. Di Tiongkok, stimulus fiskal akan terus berlanjut terutama untuk perbaikan investasi. Sementara itu, suku bunga rendah diprakirakan masih terus berlangsung di negara maju dan berkembang.

"Pemulihan ekonomi global didukung prakiraan implementasi vaksinasi, pembukaan ekonomi, dan berlanjutnya stimulus kebijakan"

Perbaikan ekonomi global 2021 berlangsung baik di negara maju maupun negara berkembang. Di negara maju, pemulihan ekonomi terutama ditopang perbaikan ekonomi AS sejalan dengan implementasi vaksin Covid-19, peningkatan mobilitas, stimulus

Grafik 4.1. Kebijakan Fiskal Ekspansif di Berbagai Negara

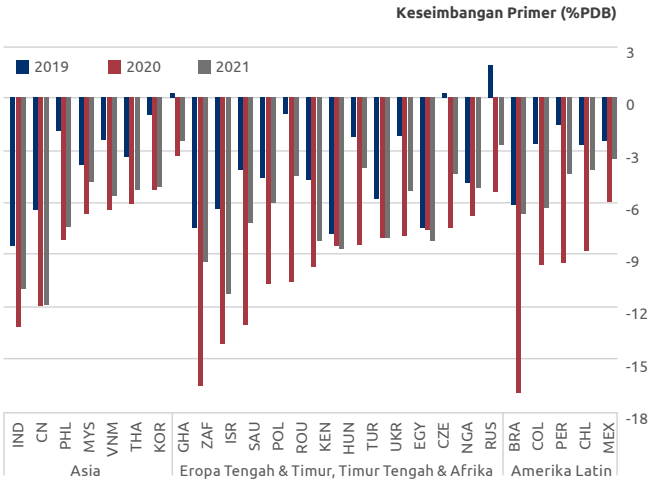

Sumber: IMF Fiscal Monitor Oktober 2020

fiskal yang lebih besar, dan ketidakpastian politik yang mereda setelah pemilu Presiden, meskipun peningkatan kembali kasus Covid-19 tetap perlu dicermati. Pemulihan ekonomi Eropa terutama didukung stimulus fiskal lanjutan melalui *European Recovery Fund*. Di Jepang, perbaikan ekonomi didukung oleh kebijakan moneter yang akomodatif dan stimulus fiskal yang berlanjut. Faktor yang dapat menghambat pemulihan di Jepang ialah permasalahan struktural terkait *aging population* dan tingkat tabungan yang tinggi. Di negara berkembang, pertumbuhan ekonomi didukung oleh Tiongkok yang juga menerapkan kebijakan *dual circulation strategy* (DCS) 2021-2025 untuk menuju lintasan pertumbuhan

Grafik 4.2. Proyeksi Suku Bunga Acuan 2021

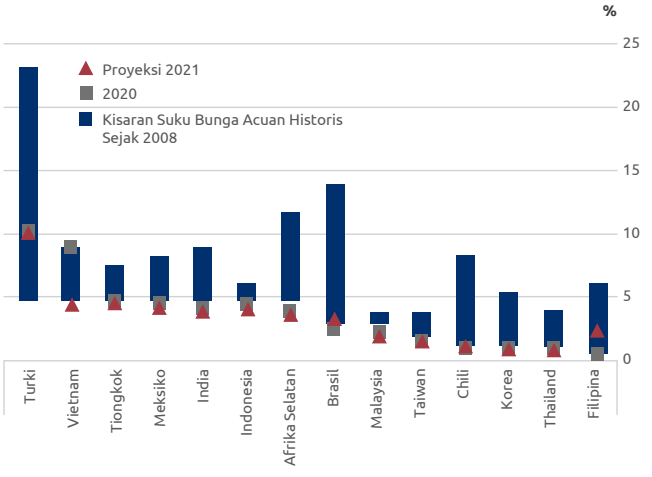

Sumber: Bloomberg

yang lebih tinggi. Sementara itu, ekonomi India juga diprakirakan membaik sejalan dengan makin terjaganya penyebaran Covid-19, perluasan pembukaan aktivitas ekonomi, dan reformasi struktural terutama pembangunan infrastruktur.

Perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia mendorong kenaikan volume perdagangan dan harga komoditas global pada 2021. Sejalan dengan kenaikan permintaan akibat pemulihan ekonomi dunia, volume perdagangan dunia diprakirakan meningkat menjadi 4,4% (Tabel 4.1) Kenaikan permintaan ini akan mendorong harga komposit komoditas ekspor Indonesia sekitar 4,0%. Harga komoditas batubara, tembaga, aluminium, dan nikel kembali meningkat pada 2021 seiring kenaikan permintaan investasi, terutama sektor infrastruktur dari Tiongkok. Harga CPO juga meningkat ditopang permintaan global, terutama konsumsi yang berangsur pulih. Sementara itu, prospek harga minyak diprakirakan meningkat menjadi 43 dolar AS per barel pada 2021 dipengaruhi oleh permintaan yang lebih tinggi dari suplai minyak dunia *(net demand)* dan implementasi *oil cuts* OPEC+ hingga 2022.

Prospek ekonomi dunia yang membaik berpotensi menurunkan ketidakpastian pasar keuangan global dan meningkatkan aliran modal ke negara berkembang. Penurunan ketidakpastian tersebut didorong oleh ekspektasi positif terhadap prospek perekonomian global yang membaik seiring dengan ketersediaan vaksin, peningkatan mobilitas dan berlanjutnya respons kebijakan stimulus fiskal dan moneter di banyak negara. Perkembangan indikator dini menunjukkan ketidakpastian pasar keuangan global semakin menurun sejak awal November 2020 pascahasil pemilihan umum Presiden di AS, meskipun volatilitas perlu tetap diwaspadai di tengah kekhawatiran peningkatan kembali kasus Covid-19 di beberapa negara. Indikator volatilitas (VIX) di pasar keuangan diprakirakan menurun, dengan membaiknya prospek perekonomian, termasuk di negara berkembang. Penurunan ketidakpastian global ini diharapkan akan mendorong aliran masuk modal asing kembali meningkat di banyak negara berkembang. Kondisi tersebut kemudian akan mengurangi tekanan lebih lanjut pada nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia.

4.2.

Perekonomian Domestik Membaik pada 2021

Prospek dunia yang membaik dan berbagai perbaikan kondisi domestik mendorong pertumbuhan ekonomi domestik terus membaik pada tahun 2021. Perkembangan berbagai indikator dini hingga akhir Desember 2020 yang terus meningkat mengonfirmasi perbaikan ekonomi domestik yang berlanjut. Mobilitas masyarakat di beberapa daerah terus menunjukkan perbaikan di tengah pembatasan kegiatan masyarakat yang masih diberlakukan di sejumlah wilayah untuk memitigasi kenaikan kembali kasus positif Covid-19. Perbaikan kinerja PMI Manufaktur yang terjadi pada semester II diprakirakan akan terus berlanjut sejalan dengan aktivitas produksi di beberapa sektor yang mulai membaik. Keyakinan dan ekspektasi konsumen terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan kegiatan usaha ke depan juga terindikasi terus menguat. Perbaikan ekspektasi ini sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang membaik dan rencana implementasi vaksinasi oleh Pemerintah yang akan dimulai pada awal 2021. Dengan optimisme tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprakirakan meningkat pada kisaran 4,8-5,8% pada 2021.

Kecepatan prospek pemulihan ekonomi Indonesia 2021 dan ke depan secara umum dipengaruhi pemenuhan satu prasyarat dan efektivitas 5 kebijakan. Prasyarat utama kecepatan pemulihan akan terkait dengan vaksinasi dan disiplin masyarakat dalam penerapan protokol Covid-19. Kedua aspek ini sangat penting menjadi perhatian karena akan memengaruhi mobilitas manusia serta barang dan jasa. Semakin tinggi mobilitas tanpa dibarengi dengan peningkatan kasus penyebaran, maka akan semakin cepat pemulihan ekonomi akan terjadi. Selain itu, prospek perekonomian domestik yang membaik juga dipengaruhi oleh lima langkah kebijakan yang saling menguatkan. Kelima kebijakan tersebut ialah (i) pembukaan sektor-sektor produktif dan aman secara nasional maupun di masing-masing daerah, (ii) percepatan realisasi fiskal, (iii) peningkatan kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, (iv) keberlanjutan stimulus moneter dan makroprudensial, serta (v) percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya terkait pengembangan UMKM.

Vaksinasi dan disiplin protokol Covid-19 akan menentukan kecepatan pemulihan ekonomi domestik. Episentrum krisis yang bersumber dari pandemi, memerlukan keberhasilan penanganan kesehatan sebagai prasyarat sehingga mobilitas masyarakat dapat kembali berangsur normal, aktivitas perekonomian dan kondisi dunia usaha membaik, dampak rambatan ke sektor keuangan dan moneter dapat diatasi. Ketersediaan vaksin dan proses vaksinasi yang direncanakan Pemerintah akan dimulai pada awal 2021 diharapkan dapat mendukung upaya membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional. Proses vaksinasi ke sebagian besar penduduk Indonesia akan memerlukan waktu sehingga penerapan protokol Covid-19 tetap harus dijalankan untuk mencegah peningkatan kembali kasus positif Covid-19 di berbagai daerah. Kombinasi kedua inisiatif ini akan memungkinkan keberlanjutan kemajuan pemulihan ekonomi dalam era kenormalan baru.

Dalam kaitan dengan kebijakan pembukaan sektor-sektor ekonomi maka hal ini akan berkaitan dengan upaya meningkatkan nilai tambah perekonomian, namun tetap aman dan sehat terhadap pandemi Covid-19. Pembukaan sektor-sektor ekonomi tersebut berdasarkan pada kontribusinya pertumbuhan ekonomi (PDB) dan/atau ekspor yang tertinggi dengan mempertimbangkan risiko penularan Covid-19 berdasarkan tingkatannya masing-masing. Hasil pemetaan mengindikasikan terdapat 52 (lima puluh dua) sektor yang sesuai dengan tingkat produktif dan aman terhadap Covid-19.[28] Sektor prioritas pertama terdiri atas 6 (enam) sektor yang aman dan memberikan kontribusi besar baik terhadap PDB

28 Penyusunan prioritas dapat dimulai dengan peta risiko penularan Covid-19 pada 52 (lima puluh dua) sektor ekonomi yang disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan prioritas tertinggi pada sektor yang risiko penularan paling rendah, sedangkan sektor yang risiko medium atau tinggi perlu penerapan protokol Covid-19 sesuai tingkatannya (Gambar 4.1). Sementara itu, penyusunan prioritas berdasarkan dampak ekonomi dapat diutamakan pada sektor-sektor yang mempunyai kontribusi terhadap PDB dan/atau ekspor tertinggi.

maupun ekspor, yakni industri makanan dan minuman; industri kimia; farmasi dan obat tradisional; kehutanan dan penebangan kayu; tanaman hortikultura; tanaman perkebunan, serta pertambangan bijih logam. Sektor yang berada pada prioritas kedua terdiri atas 15 (lima belas) sektor ekonomi yang aman dan memberikan kontribusi besar terhadap PDB atau ekspor, sebagaimana terlihat pada Gambar 4.1. Secara keseluruhan kedua prioritas tersebut menyumbang sekitar 38% dari PDB nasional. Dengan demikian, pembukaan sektor produktif dan aman dapat difokuskan pada perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam kedua prioritas tersebut, baik dengan memastikan berjalannya protokol Covid-19 maupun dengan sejumlah kebijakan insentif dari kementerian teknis dan insentif fiskal untuk dunia usaha.

Sinergi kebijakan untuk mendorong kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran juga perlu terus dilakukan, khususnya pada sektor-sektor produktif dan aman. Seperti dikemukakan pada bagian sebelumnya, pertumbuhan kredit perbankan pada tahun 2021 diprakirakan membaik sejalan dengan kondisi korporasi yang membaik. Hasil Survei Perbankan juga menunjukkan peningkatan kebutuhan pembiayaan dan rencana pengajuan kredit, penerbitan obligasi dan saham, serta utang negeri dalam 3-6 bulan mendatang. Penawaran kredit juga tetap akan kondusif dengan rendahnya suku bunga, melimpahnya likuiditas, membaiknya persyaratan kredit *(lending standard)*, serta diperpanjangnya program restrukturisasi kredit oleh OJK, dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menghindari terjadinya *moral hazard*. Guna mengurangi persepsi risiko yang masih tinggi, baik di sisi perbankan maupun sisi korporasi akibat *asymmetric information*, upaya untuk mengurangi *credit crunch* perlu dilakukan dengan mempertemukan korporasi sektor-sektor prioritas yang dengan kesiapan perbankan dalam penyaluran kredit. Industri-industri yang berada pada kuadran 4 (Gambar 4.2) perlu terus didorong untuk pertumbuhan ekonomi dan ekspor, sejalan dengan kesiapan perbankan yang tertinggi dengan pertumbuhan kredit yang meningkat dan plafon kredit (*undisbursed loan*) yang masih tersedia. Sementara itu, sektor yang berada pada kuadran pertama memerlukan penjaminan dan subsidi bunga dari Pemerintah untuk mengatasi persepsi risiko kredit yang masih tinggi di perbankan. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit dan DPK diprakirakan masing-masing 7-9% pada 2021.

Secara umum, prospek pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada 2021 ditopang oleh perbaikan seluruh komponen PDB baik berdasarkan pengeluaran maupun Lapangan Usaha (LU). Di

Gambar 4.1. Pemetaan Sektor Prioritas: Produktif dan Aman

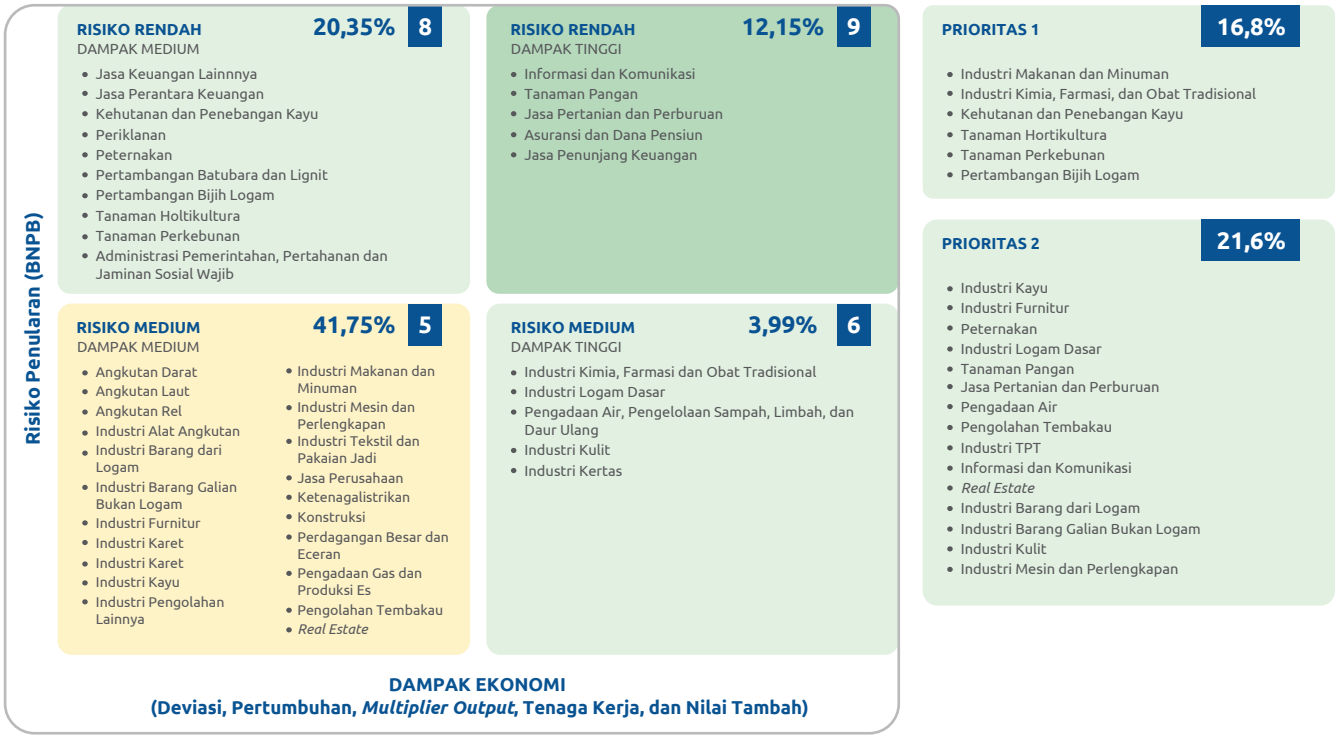

Sumber: Bank Indonesia

Gambar 4.2. Mendorong Kredit: *Matching* Permintaan-Penawaran

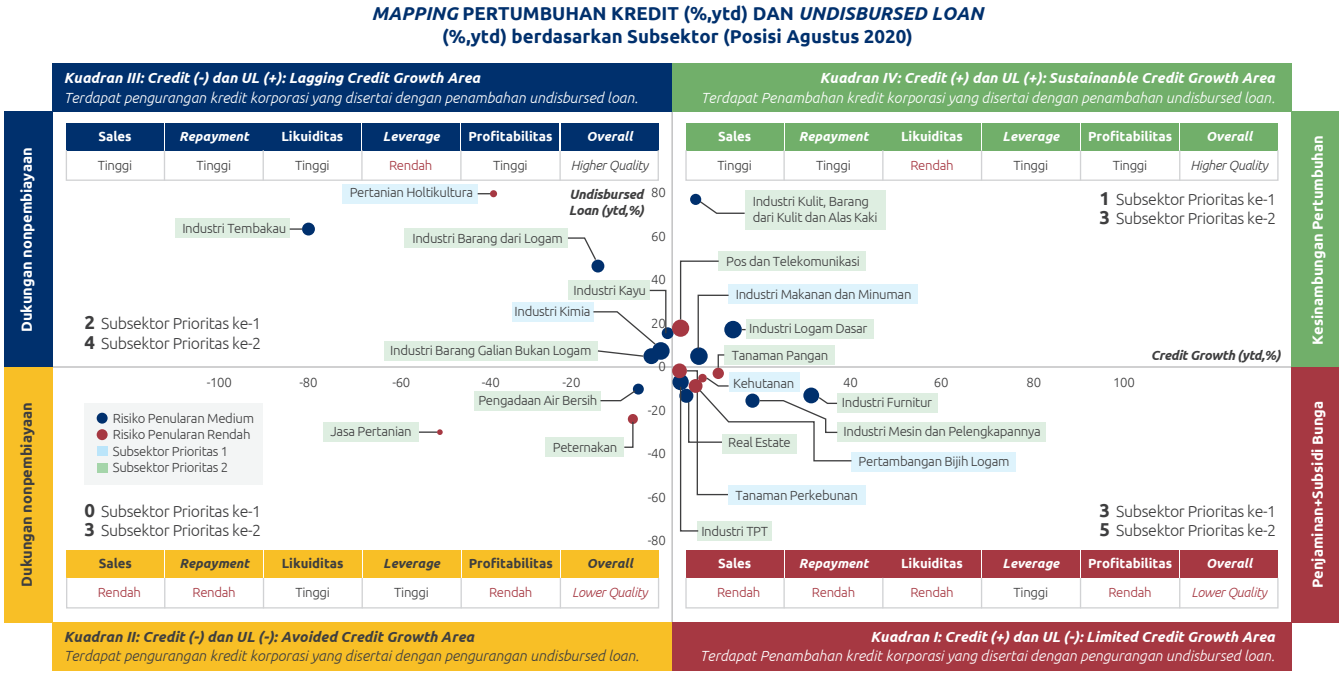

Sumber: Bank Indonesia

sisi pengeluaran, kinerja ekspor diprakirakan terus membaik sejalan peningkatan permintaan global, terutama dari AS dan Tiongkok, serta kenaikan harga komoditas. Kinerja seluruh komponen permintaan domestik juga diprakirakan membaik. Konsumsi pemerintah terus menguat didorong oleh stimulus fiskal yang berlanjut untuk akselerasi pemulihan ekonomi. Konsumsi swasta diprakirakan meningkat sejalan dengan kenaikan upah minimum dan pendapatan ekspor, serta peningkatan ekspektasi konsumen. Kinerja investasi juga akan membaik didorong perbaikan ekspor dan pembangunan infrastruktur pada Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berlanjut. Selain itu, perbaikan iklim berusaha sebagai dampak positif implementasi UU Cipta Kerja, juga akan menopang perbaikan investasi. Dari sisi lapangan usaha (LU), kinerja LU yang terkait dengan penanganan Covid-19, seperti LU Informasi dan Komunikasi, serta LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tetap tumbuh tinggi. Kinerja LU yang terkait pertanian dan pertambangan membaik ditopang oleh pemulihan ekonomi global dan harga komoditas yang meningkat. LU Industri Pengolahan dan LU Konstruksi juga tumbuh meningkat seiring dengan perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan daya saing industri manufaktur. LU lainnya juga akan tumbuh tinggi seiring dengan peningkatan permintaan domestik pada 2021.

Secara lebih rinci untuk PDB sisi pengeluaran, kinerja ekspor diprakirakan meningkat dan mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi pada 2021. Perbaikan perekonomian global yang diprakirakan berlanjut, baik di negara maju maupun negara berkembang, mendorong perbaikan ekspor, sehingga menopang pemulihan ekonomi nasional. Volume perdagangan dunia dan harga komoditas global yang diprakirakan meningkat turut mendukung peningkatan permintaan atas produk ekspor Indonesia (Grafik 4.3). Prospek positif ekspor yang berlanjut turut didukung oleh kenaikan aktivitas

Grafik 4.3. Pertumbuhan Volume Perdangan Dunia dan Harga Komoditas Global

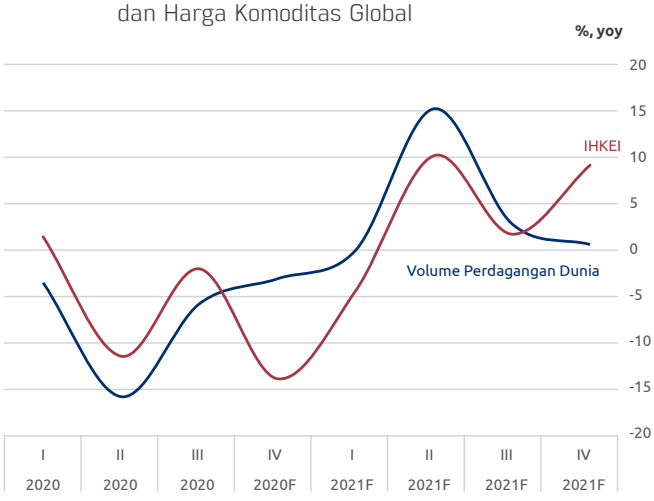

Sumber: CPB, Perhitungan Bank Indonesia

global sebagaimana tercermin pada kenaikan PMI global yang akan meningkatkan permintaan produk ekspor Indonesia (Grafik 4.4). Optimisme peningkatan ekspor tersebut sejalan dengan karakteristik komoditas ekspor Indonesia yang memiliki hubungan positif dengan permintaan eksternal. Perbaikan ekspor diprakirakan akan bertumpu pada komoditas pertambangan batu bara dan tembaga serta produk manufaktur seperti besi baja, produk kertas, *pulp*, makanan dan minuman, kimia, TPT, dan otomotif. Secara khusus, prospek ekspor Indonesia didukung oleh pemulihan aktivitas ekonomi di negara tujuan ekspor utama, antara lain Tiongkok.

Konsumsi Pemerintah diprakirakan terus menguat sejalan dengan berlanjutnya stimulus fiskal pada 2021. Kebijakan fiskal ekspansif berlanjut, tercermin pada defisit APBN 2021 sebesar Rp1.006,4 (5,7% dari PDB), setelah defisit Rp1.039,2 triliun (6,3% dari PDB) pada 2020 (Tabel 4.2). Kebijakan APBN 2021 difokuskan pada belanja untuk mendukung akselerasi pemulihan dalam jangka pendek dan transformasi ekonomi. Total belanja negara sebesar Rp2.750,0 triliun akan dialokasikan sebesar Rp1.686,2 triliun (86,3%) untuk kebijakan strategis dalam mendukung akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi. Fokus belanja tersebut diarahkan pada bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, dan teknologi informasi (Gambar 4.3). Kesinambungan stimulus juga tetap terjaga, tercermin pada anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditargetkan mencapai Rp356,4 triliun.

Tabel 4.2. Postur APBN 2021

dalam Triliun Rp

Uraian	2020 Perpres 72	2021 APBN	Pertumbuhan 2021 terhadap PERPRES 72
A. Pendapatan Negara dan Hibah	1699,9	1743,6	2,6
I. Penerimaan Dalam Negeri	1698,6	1742,7	2,6
1. Penerimaan Perpajakan	1404,5	144,5	2,9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	294,1	298,2	1,4
II. Hibah	1,3	0,9	-30,6
B. Belanja Negara	2739,2	2750,0	0,4
I. Belanja Pemerintah Pusat	1975,2	1954,5	-1,0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	763,9	795,5	4,1
1. Transfer ke Daerah	692,7	723,5	4,4
2. Dana Desa	71,2	72,0	1,1
C. Keseimbangan Primer	-700,4	-633,1	
D. Surplus/Defisit Anggaran	-1.039,2	-1.006,4	
E. Pembiayaan	1.039,2	-1.006,4	
Surplus (Defisit) %(PDB)	-6,3	-5,7	
Asumsi:			
Pertumbuhan ekonomi y.o.y (%)	0,5	5,0	
Inflasi y.o.y (%)	3,0	3,0	
Nilai tukar (rupiah terhadap dolar AS)	15300,0	14600,0	
Rata-rata suku bunga SPN 3 bln (% per tahun)	4,5	7,3	
Harga minyak internasional-ICP (dolar AS per barel)	33,0	45,0	
Lifting minyak Indonesia (ribu barel per hari)	705,0	705,0	
Lifting gas Indonesia (ribu barel setara minyak per hari)	992,0	1007,0	

Sumber: Kementerian Keuangan

Alokasi anggaran untuk kelanjutan perlindungan sosial mencapai Rp408,7 triliun untuk berbagai program. Anggaran infrastruktur sebesar Rp 417,8 triliun, tumbuh 48,6% (yoy) dibandingkan anggaran infrastruktur 2020 (Grafik 4.5). Peningkatan anggaran tersebut akan mendorong kinerja investasi pemerintah dan perbaikan struktur perekonomian.

Grafik 4.4. Perkembangan PMI Negara Maju dan Negara Berkembang

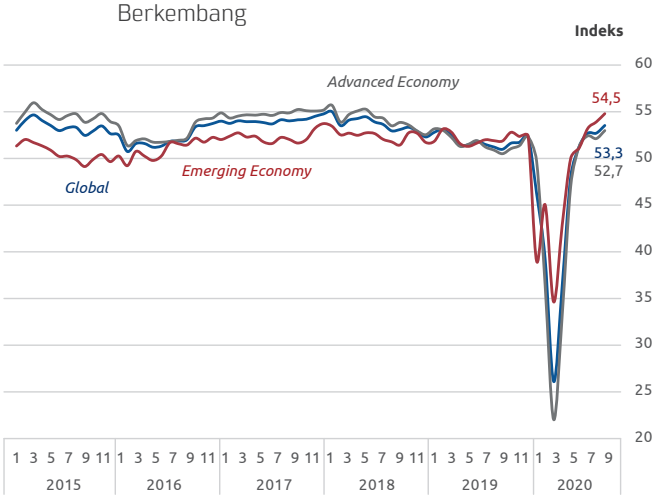

Sumber: IHS Markit

Gambar 4.3. Stimulus Pemerintah 2021

Kebijakan Strategis APBN 2021
Mendukung akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju

Pendidikan Rp550,0 Triliun
- Peningkatan skor PISA
- Penguatan PAUD
- Peningkatan kompetensi guru

Melalui belanja Pemerintah Pusat & TKDD: BOS, Dana Desa untuk PAUD, PIP, Tunjangan Guru, Bidik Misi/KIP Kuliah , LPDP

Kesehatan Rp169,7 Triliun
- Akselerasi pemulihan kesehatan akibat Covid-19
- Reformasi JKN
- *Health Security Preparedness*

Prioritas 2021: antisipasi pengadaan vaksin & vaksinasi, pemenuhan sarpras/lab/ litbang/PCR, bantuan iuran peserta PBI JKN, pembangunan/ rehab puskesmas & RS, BOK

Perlindungan Sosial Rp408,7 Triliun
- Melanjutkan perlinsos
- Reformasi secara bertahap: perlinsos komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi aging population
- Penyempurnaan DTKS

Prioritas 2021 a.l PKH (10 Juta KPM), Bansos Tunai (9 Juta KPM), Kartu Sembako (20 juta KPM), PBI JKN (86,8 Juta Jiwa)

Infrastruktur Rp417,8 Triliun

Penyediaan layanan dasar (rusun, bendungan, akses sanitasi, jaringan irigasi)

Peningkatan konektivitas (jalan, jembatan, bandara, rel kereta)

Dukungan pemulihan ekonomi serta melanjutkan program prioritas yang tertunda

Ketahanan Pangan Rp99,0 Triliun
- Meningkatkan produksi pangan (padi, jagung, kedelai, daging, dll.)
- Revitalisasi sistem pagan nasional, dan
- Pengembangan *Food Estate* (Kalteng, Sumsel, Papua)

Pariwisata Rp15,0 Triliun
- Mendorong pemulihan sektor pariwisata dengan fokus 5 kawasan super prioritas (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang)
- Pengembangan Skema KPBU

Bidang TIK Rp15,0 Triliun
- Optimalisasi memanfaatkan TIK untuk mendukung dan meningkatkan kualitas layanan publik (efisiensi, kemudahan & percepatan.
- Prioritas a.l. penyediaan BTS 5,53 lokasi desa, Penyediaan akses internet di 12.377 lokasi layanan publik, Pusat Data Nasional dll.

Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 4.5. Anggaran Infrastruktur Pemerintah

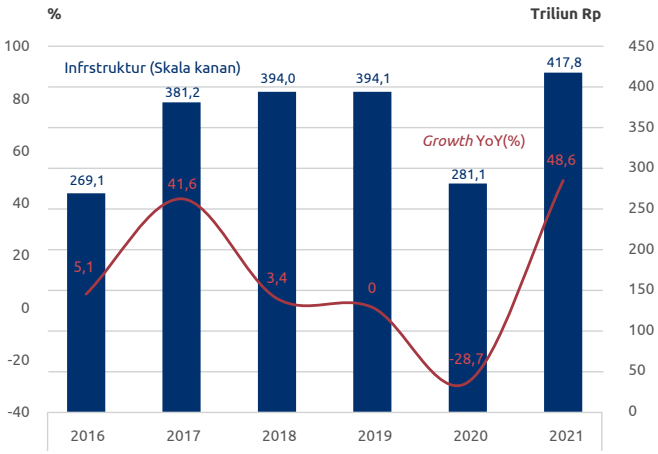

Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 4.6. Target Penyelesaian PSN 2020-2025

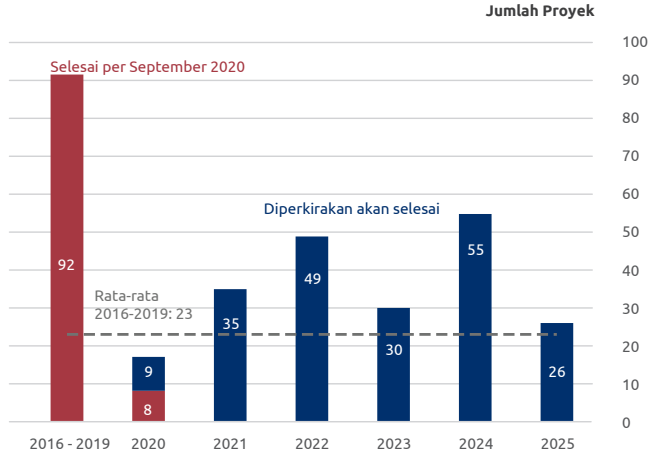

Sumber: KPPIP

Pemulihan investasi diprakirakan berlanjut secara bertahap, ditopang perbaikan iklim investasi dan pembangunan proyek infrastruktur yang berlanjut. Kinerja investasi diprakirakan meningkat seiring keyakinan berusaha yang membaik sebagai dampak implementasi UU Cipta Kerja yang akan meningkatkan daya saing investasi Indonesia. Implementasi UU Cipta Kerja akan memperbaiki ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, serta insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut pada gilirannya akan meningkatkan keyakinan berusaha, sehingga mendorong investasi yang juga berperan penting dalam penyerapan lapangan kerja dan perekonomian Indonesia. Peningkatan investasi juga ditopang oleh Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk pembangunan infrastruktur, yang terus berlanjut. Pada 2021, diprakirakan terdapat tambahan sekitar 35 proyek yang dapat diselesaikan oleh Pemerintah (Grafik 4.6). Pembangunan proyek infrastruktur pada 2021 akan difokuskan pada infrastruktur konektivitas dan pelayanan dasar, seperti pembangunan bendungan, jalan, serta pembangkit, yang akan mendorong perbaikan investasi bangunan (Gambar 4.4). Sementara itu, mega proyek energi dan ketenagalistrikan, serta teknologi informasi berpotensi mendorong perbaikan investasi nonbangunan 2021. Prospek investasi juga dipengaruhi oleh aksi sejumlah korporasi, baik yang telah berkomitmen maupun yang dalam proses penjajakan, untuk melakukan relokasi industri ke Indonesia. Rencana investasi pada industri manufaktur terutama di kawasan timur Indonesia selanjutnya diharapkan dapat membawa Indonesia menjadi bagian dari *regional value chain* dan mendorong kinerja ekspor nasional.

Konsumsi swasta diprakirakan tumbuh meningkat pada 2021 sejalan dengan perbaikan pendapatan dan ekspektasi pelaku ekonomi terhadap prospek ekonomi sejalan dengan penanggulangan pandemi. Perbaikan pendapatan bersumber dari ekspor nonmigas, terutama manufaktur, pertambangan dan pertanian. Perbaikan pendapatan juga ditopang oleh kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di sebagian provinsi, seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah, dengan kisaran 2,0% hingga 5,6% pada 2021. Ekspektasi terhadap penanganan pandemi diprakirakan membaik sejalan dengan rencana implementasi vaksin Covid-19 yang akan dilaksanakan mulai awal 2021. Keberhasilan pelaksanaan vaksinasi diharapkan dapat mendorong peningkatan mobilitas masyarakat sehingga menopang kinerja konsumsi swasta. Selain itu, stimulus fiskal Pemerintah melalui bantuan sosial dan program lainnya turut membantu menjaga daya beli masyarakat (Tabel 4.3).

Tabel 4.3. Proyeksi Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran

%YoY

Komponen	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021
Produk Domestik Bruto	-2,0 - -1,0	4,8 - 5,8
Konsumsi Swasta	-2,6 - -1,6	4,6 - 5,6
Konsumsi Pemerintah	4,5 - 5,5	4,9 - 5,9
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-4,5 - -3,5	3,8 - 4,8
Ekspor Barang dan Jasa	-8,2 - -7,2	4,5 - 5,5
Impor Barang dan Jasa	-15,3 - -14,3	3,3 - 4,3

Sumber: Bank Indonesia

Sejalan dengan perbaikan ekspor dan permintaan domestik, impor diprakirakan tumbuh positif pada 2021. Impor diprakirakan akan tumbuh positif sejalan dengan perbaikan ekspor dan permintaan domestik. Akselerasi pelaksanaan PSN pada 2021 akan meningkatkan kebutuhan impor antara lain berupa mesin, peralatan, dan komponen untuk pengerjaan berbagai proyek infrastruktur. Di tengah kebutuhan impor yang meningkat untuk memenuhi permintaan domestik, Pemerintah berupaya mengendalikan pertumbuhan impor dengan pemberlakuan substitusi impor di sektor industri. Kementerian Perindustrian menargetkan substitusi bahan baku atau bahan penolong serta barang modal untuk sektor industri minimal mencapai 15% pada tahun 2021. Salah satu bahan baku impor yang perlu ditekan adalah sektor industri kimia. Sementara untuk barang modal, sektor industri permesinan dan elektronik menjadi target utama substitusi. Sasaran tersebut akan terus ditingkatkan pada tahun selanjutnya yaitu sebesar 35% pada tahun 2022. Selain itu, target substitusi impor untuk sektor industri dapat dicapai melalui optimalisasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Berdasarkan Lapangan Usaha (LU), perbaikan kinerja diprakirakan terjadi di seluruh LU PDB 2021. LU terkait dengan penanganan Covid-19 seperti LU Informasi dan Komunikasi, serta LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tetap tumbuh tinggi, melanjutkan tren pertumbuhan tahun sebelumnya. LU Informasi dan Komunikasi diprakirakan tumbuh tinggi, seiring dengan perkembangan ekonomi digital terutama *e-commerce* yang pesat. Penyesuaian aktivitas masyarakat beradaptasi di era *new normal* pascapandemi Covid-19 turut mendorong pemanfaatan komunikasi virtual. LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh tinggi, didorong oleh kebutuhan untuk menanggulangi dan memitigasi risiko Covid-19. Penggunaan dan pendistribusian vaksin Covid-19 sebagai *emergency use* pada 2021 memberikan dampak positif pada kinerja LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sementara itu, pemulihan ekonomi global yang membaik dan harga komoditas global yang meningkat akan menopang perbaikan kinerja LU yang terkait pertanian dan pertambangan. Kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan akan tumbuh positif, demikian pula dengan LU Pertambangan dan Penggalian. Hal tersebut

Gambar 4.4. Rencana Pembangunan Infrastruktur Konektivitas dan Pelayanan Dasar

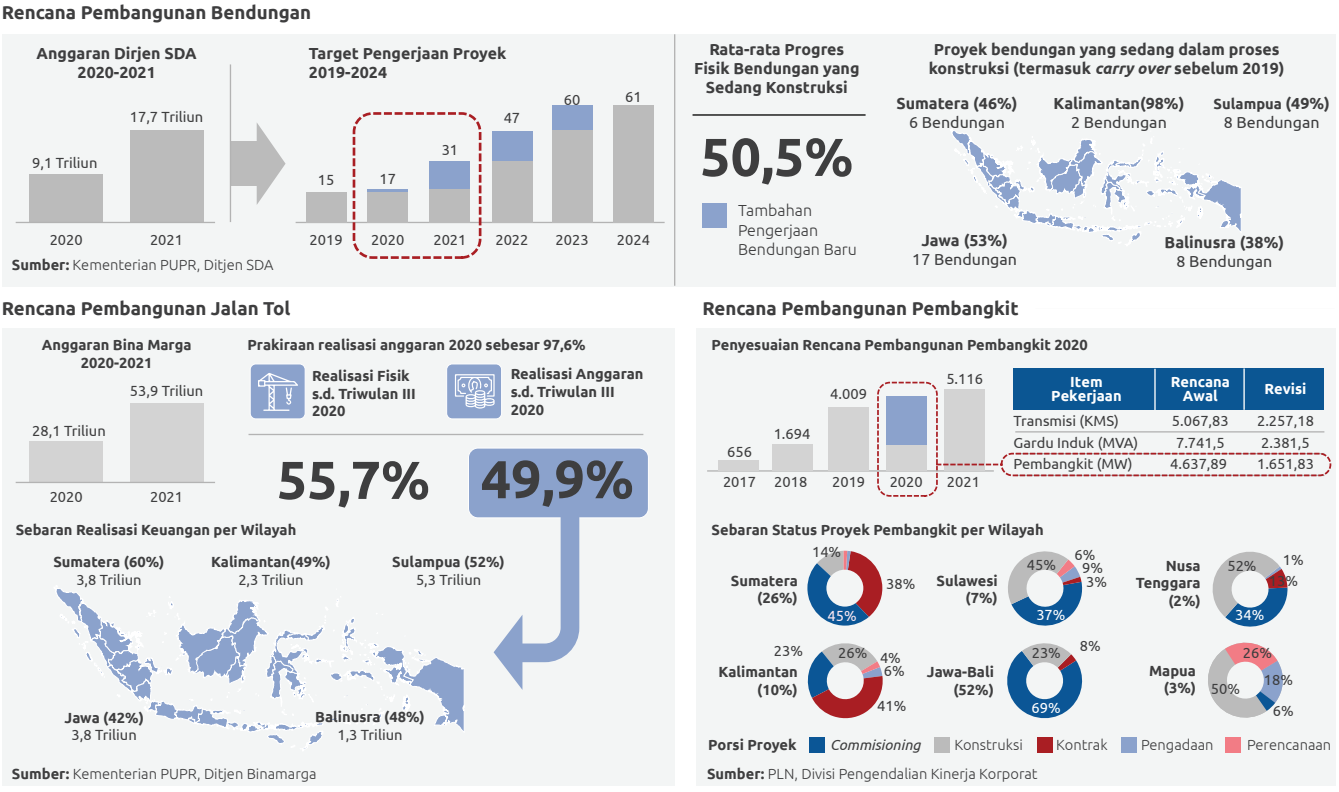

seiring dengan permintaan ekspor dari negara mitra dagang utama yang meningkat dan harga batubara serta logam dasar yang mengalami peningkatan (Tabel 4.4).

Tabel 4.4. Proyeksi Pertumbuhan PDB Sisi Sektoral

%YoY

Komponen	2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021
Produk Domestik Bruto	5,02	-2,0 - -1,0	4,8 - 5,8
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,64	1,1-2,1	4,0-5,0
Pertambangan & Penggalian	1,22	-2,5 - -1,5	0,6-1,6
Industri Pengolahan	3,80	-2,7 - -1,7	4,6-5,6
Pengadaan Listrik Dan Gas	4,04	-1,8 - -0,8	2,8-3,8
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,83	5,4 - 6,4	4,8-5,8
Konstruksi	5,76	-3,0 - -2,0	5,0-6,0
Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor	4,62	-3,4 - -2,4	4,2-5,2
Transportasi Dan Pergudangan	6,40	-12,3 - -11,3	8,9-9,9
Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	5,80	-8,6 - -7,6	6,9-7,9
Informasi Dan Komunikasi	9,41	10,3 - 11,3	8,6-9,6
Jasa Keuangan Dan Asuransi	6,60	2,1 - 3,1	2,9-3,9
Real Estat	5,74	2,3 - 3,3	2,3-3,3
Jasa Perusahaan	10,25	-4,3 - -3,3	7,7-8,7
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,67	1,2 - 2,2	5,1-6,1
Jasa Pendidikan	6,29	3,5 - 4,5	6,3-7,3
Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	8,68	11,5 - 12,5	10,7-11,7
Jasa Lainnya	10,55	-3,5 - -2,5	6,3-7,3

Sumber: Bank Indonesia

Pertumbuhan LU lainnya, seperti LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi, LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta LU Transportasi dan Pergudangan diprakirakan juga membaik. Di sisi industri, pertumbuhan LU Industri Pengolahan diprakirakan tumbuh positif setelah pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi. Hal ini seiring dengan perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur, dan upaya Pemerintah meningkatkan daya saing industri manufaktur. LU Konstruksi tumbuh positif seiring dengan optimisme Pemerintah dalam mencapai target *output* infrastruktur 2021. Sementara itu, LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta LU Transportasi dan Pergudangan tumbuh positif setelah terkontraksi cukup dalam pada 2020. Mobilitas masyarakat yang secara bertahap pulih dan upaya Pemerintah mempromosikan kembali pariwisata Indonesia akan mendorong pertumbuhan ketiga LU tersebut. Kegiatan prioritas Pemerintah untuk pariwisata 2021 difokuskan untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata melalui pengembangan destinasi super prioritas dan pengembangan aspek 3A (atraksi, aksesibilitas, dan amenitas) serta peningkatan 2P (promosi dan partisipasi). Infrastruktur konektivitas dan skema pembiayaan pembangunan destinasi wisata juga dipersiapkan sebagai sarana pendukung.

LU lainnya diprakirakan juga tumbuh cukup tinggi. LU Jasa Pendidikan tumbuh seiring pengeluaran swasta untuk pendidikan yang terus meningkat. LU Jasa Perusahaan dan LU Real Estat akan tumbuh positif sejalan dengan aktivitas ekonomi yang sudah mulai pulih pada 2021. Kinerja LU Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan akan meningkat di 2021 seiring dengan aktivitas Pemerintah yang tinggi dalam pelaksanaan PEN. LU Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh positif, demikian pula dengan LU Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang. Pertumbuhan kedua LU tersebut dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi listrik dan air sejalan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, kinerja positif kedua LU turut ditunjang oleh selesainya berbagai proyek pembangkit listrik dan sistem penyediaan air minum (SPAM).

Secara spasial, pemulihan ekonomi pada 2021 terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Pelonggaran PSBB di banyak daerah diprakirakan akan mendorong perbaikan ekonomi ke depan. Selain itu, kebijakan percepatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) oleh Pemerintah melalui kemudahan persyaratan transfer mendukung realisasi belanja daerah sehingga menopang perbaikan ekonomi daerah. Dari sisi eksternal, pulihnya perekonomian Tiongkok dan AS menjadi pendorong perbaikan kinerja ekspor sejumlah produk industri di Jawa, Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), dan Sumatera. Dari sisi lapangan usaha, perbaikan ekonomi di wilayah Sulampua didorong oleh kelanjutan investasi dan permintaan industri baja dan tambang yang meningkat dari luar negeri. Di Jawa, perbaikan ekonomi terutama ditopang oleh membaiknya konsumsi sejalan meningkatnya mobilitas sehingga mendukung perbaikan di lapangan usaha industri. Sementara itu, lapangan usaha perdagangan membaik di seluruh wilayah sejalan dengan aktivitas konsumsi dan ekspor-impor yang membaik. Perbaikan pertumbuhan ekonomi daerah diperkirakan berlanjut pada tahun 2021.

Stabilitas eksternal pada tahun 2021 tetap terjaga didukung Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2021 yang diprakirakan surplus. Surplus NPI 2021

Keterangan: Ilustrasi perekonomian Indonesia yang melanjutkan perbaikan pada 2021

tersebut didukung oleh defisit transaksi berjalan yang terjaga dan transaksi modal dan finansial yang meningkat. Defisit transaksi berjalan diprakirakan berada di kisaran 1,0-2,0% dipengaruhi ekspor yang tumbuh positif seiring dengan permintaan global yang mulai pulih dan impor yang diprakirakan naik untuk memenuhi permintaan domestik yang meningkat. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mendorong peningkatan ekspor dan mengurangi ketergantungan impor. Ekspor manufaktur ditingkatkan dengan mendorong implementasi kebijakan di industri manufaktur, seperti percepatan pemulihan sektor prioritas dan proses digitalisasi 4.0. Peran pariwisata juga ditingkatkan dengan mengakselerasi pengembangan destinasi super prioritas. Program PEN untuk pemulihan pariwisata juga dilakukan dengan memberikan insentif pada pelaku usaha pariwisata. Proses pemulihan sektor pariwisata diharapkan mengurangi dampak pandemi Covid-19 dan membantu persiapan pada saat wisatawan mancanegara (wisman) kembali berkunjung ke Indonesia.

Aliran modal masuk asing membaik sehingga meningkatkan surplus transaksi modal dan finansial. Surplus transaksi modal dan finansial pada 2021 diprakirakan lebih besar dari surplus yang dicapai pada tahun sebelumnya. Satu sisi, aliran modal masuk tersebut didorong oleh likuiditas global yang memadai. Sisi lain, aliran modal masuk dipengaruhi oleh prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada pada lintasan pemulihan yang meningkat, daya tarik aset keuangan domestik yang tetap baik, dan premi risiko yang menurun. Berdasarkan jenisnya, aliran investasi langsung juga diprakirakan meningkat seiring perbaikan iklim usaha. Aliran investasi portofolio juga diprakirakan meningkat sejalan dengan kebijakan moneter ekspansif di negara-negara maju yang terus berlanjut sehingga menopang likuiditas global. Sementara itu, aliran investasi lainnya juga diprakirakan akan meningkat seiring dengan kebutuhan pendanaan infrastruktur yang meningkat dan pertumbuhan ekspor-impor yang membaik.

Inflasi pada 2021 tetap terkendali dalam sasaran 3,0±1%. Hal ini tidak terlepas dari konsistensi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah (TPIP dan TPID). Inflasi inti pada 2021 diprakirakan tetap terkendali, meskipun meningkat sejalan dengan kenaikan permintaan domestik. Peningkatan inflasi inti pada 2021 bersumber dari permintaan domestik seiring peningkatan mobilitas masyarakat dan kenaikan harga komoditas global. Inflasi inti diprakirakan tetap terkendali diimbangi oleh nilai tukar yang sesuai dengan fundamentalnya dan ekspektasi inflasi yang tetap terjangkar dalam rentang sasaran. Pergerakan inflasi inti yang semakin rendah sejak 2015 dan konsistensi kebijakan dalam mengarahkan inflasi dalam rentang sasaran berkontribusi dalam membawa ekspektasi inflasi tetap terjangkar ke sasaran inflasi. Inflasi *Volatile Food* (VF) diprakirakan tetap terkendali didukung oleh iklim yang kondusif dan langkah Pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Sementara

itu, prospek inflasi *Administered Prices* (AP) pada tahun 2021 diprakirakan meningkat sejalan perbaikan mobilitas dan kenaikan harga komoditas global.

Prospek inflasi di sebagian besar wilayah yang terkendali mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional 3,0±1%. Prakiraan ini ditopang oleh penguatan kerja sama antardaerah dalam menjaga ketersediaan pangan antardaerah. Koordinasi TPIP dan TPID memberikan kontribusi yang besar dalam pengendalian inflasi daerah, mengacu pada Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah 2019-2021. Dari sisi keterjangkauan harga, upaya yang dilakukan adalah menjaga daya beli masyarakat, stabilisasi nilai tukar Rupiah, dan penguatan penyaluran KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga). Hal ini diharapkan dapat kembali meneruskan penurunan rata-rata inflasi dan volatilitas inflasi 10 komoditas pangan strategis yang terjadi selama 2 tahun terakhir. Upaya untuk menjaga ketersediaan pasokan antara lain memperkuat manajemen impor pangan dan memastikan cadangan pangan Pemerintah terpenuhi khususnya komoditas beras. Tujuan utama dari upaya ini adalah tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) khusus beras menjadi 1,5 juta ton. Sementara untuk kelancaran distribusi, upaya yang dilakukan adalah peningkatan distribusi melalui digital *platform* dan penguatan kerja sama antardaerah. Perbaikan ini ditujukan untuk terus menurunkan disparitas harga antarprovinsi dengan rata-rata nasional.

4.3.

Bank Indonesia Terus Mendukung Pemulihan Ekonomi

Bauran kebijakan Bank Indonesia tahun 2021 diarahkan untuk secara bersama memperkuat optimisme pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Dukungan Bank Indonesia ditempuh baik dari kebijakan utama di kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran maupun melalui kebijakan pendukung di UMKM, ekonomi-keuangan syariah, dan internasional (Gambar 4.5). Stimulus kebijakan moneter akan dilanjutkan sampai dengan tanda-tanda adanya tekanan inflasi, sementara kebijakan stabilisasi diarahkan agar nilai tukar Rupiah bergerak sesuai fundamental dan mekanisme pasar. Kebijakan makroprudensial akomodatif juga terus ditempuh untuk mendorong peningkatan kredit dan pembiayaan bagi pemulihan ekonomi nasional, dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Digitalisasi sistem pembayaran sesuai BSPI 2025 dan pengelolaan uang Rupiah sesuai BPUR 2025 terus diakselerasi untuk mendukung ekonomi-keuangan digital sebagai sumber pemulihan ekonomi, khususnya UMKM dan sektor ritel. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah, KSSK, perbankan, dan dunia usaha untuk memperkuat optimisme pemulihan ekonomi nasional.

Stimulus kebijakan moneter akan dilanjutkan di tahun 2021 untuk mendorong pemulihan ekonomi, dengan tetap menjaga stabilitas moneter. Dalam kaitan ini, suku bunga rendah dan likuiditas longgar akan dipertahankan sampai dengan terdapat tanda-tanda tekanan inflasi yang meningkat. Likuiditas juga tetap longgar untuk mendukung penyaluran kredit perbankan dan tetap terjaganya stabilitas sistem keuangan. Strategi operasi moneter akan ditempuh untuk mendukung stance kebijakan moneter tersebut. Selain itu, stabilitas nilai tukar Rupiah yang sesuai fundamental dan mekanisme pasar terus dilakukan untuk memastikan kondisi tetap kondusif bagi pemulihan ekonomi nasional. Koordinasi erat antara stimulus moneter Bank Indonesia dan stimulus fiskal Pemerintah terus dipererat untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia masih akan melanjutkan pembelian SBN dari pasar perdana untuk pembiayaan APBN Tahun 2021 sebagai pembeli siaga dengan urutan prioritas metode pembelian, yakni (i) lelang SBN dengan pengajuan penawaran pembelian nonkompetitif *(noncompetitive bid)*, (ii) lelang tambahan (*green shoe option*), dan (iii) *Private Placement*, sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020 sebagaimana telah diperpanjang tanggal 11 Desember 2020 hingga 31 Desember 2021. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan KSSK untuk mendorong kredit dan pembiayaan bagi pemulihan ekonomi nasional. Sinergi antara Pemerintah, Bank Indonesia, KSSK, perbankan, dan dunia usaha perlu terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan kredit yang lemah.

Gambar 4.5. Arah Bauran Kebijakan Bank Indonesia Tahun 2021

Sumber: Bank Indonesia

Kebijakan makroprudensial tetap akan akomodatif untuk terus mendorong peningkatan kredit dan pembiayaan bagi pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia akan terus melakukan asesmen kemungkinan pelonggaran lebih lanjut sejumlah instrumen kebijakan makroprudensial yang ada maupun yang baru untuk mendorong kredit dan pembiayaan bagi dunia usaha. Kebijakan transparansi suku bunga perbankan akan diperkuat untuk mendorong penurunan suku bunga kredit lebih cepat. Untuk mendorong pertumbuhan berbasis UMKM, Bank Indonesia akan mengeluarkan kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) dengan memperluas target dan jangkauan pembiayaan inklusif, insentif bagi bank yang mendorong korporatisasi UMKM dan sektor prioritas, serta mendorong sekuritisasi kredit UMKM. Selain itu, pengawasan makroprudensial Bank Indonesia dan koordinasi dengan pengawasan mikroprudensial oleh OJK akan semakin diperkuat agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Forum pengawasan perbankan terpadu antara Bank Indonesia dengan OJK akan terus berlanjut dan diperluas dengan LPS. Forum tersebut diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga untuk secara bersama menjaga stabilitas sistem keuangan.

"Bank Indonesia terus mempercepat digitalisasi sistem pembayaran sebagai implementasi BSPI 2025"

Bank Indonesia terus mempercepat digitalisasi sistem pembayaran sebagai implementasi BSPI 2025 dalam meningkatkan peran ekonomi dan keuangan digital sebagai sumber pemulihan ekonomi. Kampanye QRIS secara nasional dan di daerah akan terus dilanjutkan untuk mencapai 12 (dua belas) juta *merchant* UMKM teregister digital secara nasional. QRIS yang saat ini dengan *Merchant Present Mode* (MPM) akan diperluas dengan *Customer Present Mode* (CPM) sehingga diharapkan akan semakin memperluas transaksi pembayaran digital sesuai preferensi masyarakat dengan biaya murah, cepat, dan aman. *Digital banking* terus didorong untuk memperluas dan mempermudah layanan jasa keuangan ritel, baik secara sendiri maupun kolaborasi dengan *fintech*. Inovasi dalam transaksi pembayaran digital terus didorong melalui *Sandbox* 2.0. sehingga diharapkan memacu lebih banyak *start-up*, khususnya untuk sektor ritel dan UMKM. Elektronifikasi bantuan sosial, transportasi, dan transaksi keuangan pemerintah daerah terus ditingkatkan. Digitalisasi, sentralisasi distribusi, dan efisiensi pengelolaan uang Rupiah ke seluruh wilayah NKRI juga terus dipercepat, termasuk wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T).

Bank Indonesia juga mempercepat pendalaman pasar uang sesuai *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025, untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter dan mendukung pembiayaan perekonomian nasional. Pengembangan infrastruktur pasar uang yang efisien, aman, andal, dan berstandar internasional akan menjadi fokus kebijakan tahun 2021. Pengembangan pasar uang dilakukan secara *end-to-end*, baik di *platform* perdagangan (*trading venue*), kliring dan penyelesaian transaksi (*clearing and settlement*), hingga repositori perdagangan (*trade repository*). Untuk *trading venue*, Peraturan Bank Indonesia (PBI) *Market Operator* yang dikeluarkan pada 2019 akan ditindaklanjuti dengan pengembangan *electronic trading platform* (ETP) di pasar dengan *multimatching trading system* pada 2021, dan modernisasi BI-ETP untuk operasi moneter pada 2022. Sementara itu, pengembangan infrastruktur *Central Clearing Counterparty* (CCP) ditargetkan beroperasi mulai 2021. Pengembangan ETP dan CCP akan meningkatkan transaksi derivatif suku bunga, khususnya *interest rate swap* (IRS) dan repo SBN, dan derivatif nilai tukar. Pengembangan infrastruktur pasar uang juga terintegrasi dan interkoneksi dengan infrastruktur sistem pembayaran yang akan dimodernisasi dan berstandar internasional. Pengembangan infrastruktur pasar keuangan akan meningkatkan volume transaksi, mendorong penurunan suku bunga, dan biaya transaksi yang murah, sehingga pasar keuangan lebih likuid, efisien, semakin berkembang, serta mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter dan penyediaan pembiayaan bagi perekonomian.

Bank Indonesia juga terus memperluas program pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM dilakukan melalui korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan pembiayaan untuk meningkatkan

skala ekonomi UMKM khususnya pada sektor-sektor prioritas sehingga mampu meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDB serta mendorong UMKM *Go Export* dan *Go Digital*. Program korporatisasi diarahkan untuk mendorong UMKM memasuki ekosistem digital melalui fasilitasi kemudahan perizinan, pembentukan klaster-klaster produktif, dan infrastruktur digital UMKM. Program peningkatan kapasitas ditujukan untuk meningkatkan kemampuan UMKM secara *end-to-end*; mulai pengembangan produk, program pelatihan manajemen dan keuangan, sampai dengan penyiapan akses pasar, melalui Program *on Boarding* UMKM (*e-payment, e-commerce,* dan *e-financing*). Sementara itu, program pembiayaan ditempuh melalui implementasi ketentuan mengenai pencapaian pemenuhan kredit UMKM perbankan dan nonbank, serta perluasan akses UMKM dalam pemberdayaan kredit bersubsidi/KUR untuk mempercepat integrasi inklusi ekonomi dan keuangan digital secara nasional. Penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia (KKI) yang semakin sukses mengangkat UMKM *Go Export* dan *Go Digital* akan semakin ditingkatkan dalam tahun 2021, sekaligus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GerNas BBI).

Peran penting Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terus ditingkatkan sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia dan sekaligus menjadi pemain global yang handal. Untuk itu, Bank Indonesia senantiasa memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik di dalam wadah Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) maupun dengan pondok pesantren, asosiasi pengusaha, perbankan, maupun para ulama, akademisi, dan masyarakat luas. Akselerasi implementasi ekosistem *halal value chain* (*local* dan *global halal value chain*) terus ditingkatkan, termasuk didalamnya dari aspek pelaku dan model bisnis, kelembagaan, serta infrastruktur pendukung yang diperkuat oleh proses digitalisasi. Pemberdayaan ekonomi syariah difokuskan pada sektor-sektor unggulan, yaitu pertanian untuk makanan halal, fesyen, wisata ramah muslim, dan energi terbarukan. Keuangan syariah diperluas baik di sektor keuangan maupun mobilisasi ZISWAF produktif sesuai prinsip penggunaannya. Perluasan keuangan tersebut termasuk pengembangan instrumen keuangan syariah, seperti instrumen valas dan instrumen pembiayaan jangka panjang, maupun pengembangan keuangan sosial syariah dan integrasinya dengan keuangan komersial sebagai alternatif pembiayaan. Kampanye literasi ekonomi dan keuangan syariah terus diperluas melalui penyelenggaraan tiga kali Festival Ekonomi Keuangan Syariah (FESyar) di tingkat wilayah, dan ISEF berskala nasional dan internasional.

Untuk kebijakan pendukung di sisi kebijakan internasional, Bank Indonesia akan terus aktif dalam berbagai forum internasional serta memperkuat kerja sama dengan berbagai mitra strategis internasional agar semakin mendukung upaya peningkatan investasi dan perdagangan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Bersinergi dengan Pemerintah dan berbagai pihak, Bank Indonesia terus meningkatkan persepsi positif investor dan lembaga rating melalui kegiatan *engagement* yang lebih proaktif. Bank Indonesia terus memfasilitasi promosi perdagangan dan investasi sektor-sektor prioritas melalui dukungan *Investor Relations Unit* (IRU) baik di tataran daerah, nasional dan internasional. Dalam hal ini, sejumlah langkah diperkuat, termasuk pemetaan ketersediaan proyek sesuai dengan preferensi investor dan penyelenggaraan kegiatan promosi bersama baik di luar negeri maupun di dalam negeri untuk produk/proyek pada sektor prioritas. Secara khusus, Bank Indonesia juga mendukung langkah bersama dalam pemanfaatan perjanjian FTA/CEPA dan *Local Currency Settlement* (LCS) untuk optimalisasi perdagangan dan investasi luar negeri.

4.4.

Ekonomi Indonesia Menguat dalam Jangka Menengah

Perekonomian Indonesia pada 2022 diprakirakan kembali meningkat didorong perbaikan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi global 2022 diprakirakan semakin meningkat seiring tekanan Covid-19 yang semakin berkurang dan dampak stimulus kebijakan. Kebijakan stimulus diprakirakan masih berlanjut di beberapa negara untuk terus mendorong akselerasi peningkatan pertumbuhan ekonomi global setelah pandemi berakhir. Prospek tersebut akan ditopang oleh kinerja ekonomi negara maju dan berkembang yang semakin meningkat. Kebijakan stimulus fiskal masih akan berlanjut di beberapa negara dengan besaran dan akselerasi yang menurun sejalan dengan upaya konsolidasi fiskal di jangka menengah. Kebijakan moneter global akomodatif yang ditempuh sebelumnya diprakirakan akan mendorong pertumbuhan investasi pada 2022 dan periode-periode setelahnya. Koordinasi antarnegara dan lembaga internasional yang terus diperkuat akan berkontribusi positif mendorong pemulihan ekonomi global pascapandemi. Aktivitas perdagangan dunia akan kembali meningkat sejalan prospek pertumbuhan ekonomi global yang membaik yang kemudian berdampak pada kenaikan harga komoditas dunia. Dengan prakiraan ini, pertumbuhan ekonomi global pada 2022 diprakirakan meningkat pada kisaran 3,8%.

Bersamaan dengan pengaruh positif ekonomi global, berbagai faktor domestik juga mendorong penguatan ekonomi nasional pada 2022. Ekonomi Indonesia diprakirakan terus membaik pada 2022, didorong oleh prospek ekonomi global yang meningkat dan dampak kebijakan lanjutan untuk mendukung reformasi struktural. Pertumbuhan ekonomi global yang semakin baik pada 2022 sejalan tekanan Covid-19 yang berkurang dan dampak positif stimulus kebijakan di banyak negara akan menopang perbaikan ekspor Indonesia. Hal tersebut pada gilirannya akan meningkatkan aktivitas produksi dan investasi. Perbaikan iklim berusaha sebagai dampak implementasi UU Cipta Kerja juga akan mendukung perbaikan investasi domestik. Kinerja konsumsi swasta juga akan kembali pulih, ditopang oleh peningkatan pendapatan, terutama dari kinerja ekspor yang terus meningkat. Sinergi kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah dan otoritas terkait yang terus diperkuat, termasuk kebijakan reformasi struktural yang berlanjut, akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi domestik diprakirakan meningkat pada di kisaran 5,4-5,9% pada 2022.

Dalam perkembangan selanjutnya, ekonomi nasional kembali menguat didorong prospek perbaikan ekonomi global. Setelah fase pemulihan pada 2021-2022, pertumbuhan ekonomi global diprakirakan akan terus membaik dan kembali ke tingkat pertumbuhan normal. Akselerasi ekonomi negara berkembang mempunyai peranan yang besar dalam pemulihan ekonomi global. Selain itu, ketegangan perdagangan yang mereda dan risiko geopolitik yang membaik menjadi faktor pendukung pemulihan pertumbuhan ekonomi global. Dalam jangka menengah, baik negara maju maupun berkembang akan beradaptasi menghadapi era kenormalan baru setelah pandemi Covid-19. Hal ini bertujuan untuk meredam *shock* pada sisi penawaran dan permintaan. Langkah penyesuaian sisi penawaran seperti metode produksi dan distribusi perlu dilakukan guna menjaga utilisasi kapasitas produksi. Sementara dari sisi permintaan, masyarakat global akan dihadapkan pada *shifting* perilaku konsumsi yang diperkirakan akan persisten. Sejalan dengan itu, volume perdagangan dunia diprakirakan tumbuh membaik. Harga komoditas dunia diprakirakan

stabil sementara harga minyak diprakirakan meningkat. Kenaikan harga minyak didukung oleh prospek kebijakan *oil cuts* OPEC+ yang berlanjut pada jangka menengah. *Stance* kebijakan moneter diprakirakan akomodatif dalam beberapa tahun mendatang. Kebijakan moneter akomodatif banyak negara diprakirakan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi global dalam jangka menengah.

"Prospek perbaikan ekonomi global dan dampak positif reformasi struktural mendorong penguatan perekonomian Indonesia dalam jangka menengah"

Beberapa tantangan struktural global perlu mendapat perhatian karena dapat menahan perbaikan prospek perekonomian global tersebut. Tantangan tersebut terkait penuaan populasi, investasi yang rendah, ketimpangan pendapatan yang berlanjut, dan pergeseran sektor ekonomi menuju sektor jasa. Faktor penuaan populasi di negara maju dapat mengakibatkan ketersediaan angkatan kerja menjadi lebih terbatas. Investasi global saat ini juga belum optimal dalam membantu peningkatan akumulasi kapital dan pemanfaatan inovasi teknologi. Ketimpangan pendapatan, terutama di negara berkembang diprakirakan berlanjut akibat kualitas pertumbuhan yang masih rendah. Pergeseran dan penyesuaian dari sektor manufaktur menuju sektor jasa dapat menahan laju pertumbuhan produktivitas global. Tantangan tersebut dapat meluas ke intra-sektor utama, yaitu proses penyesuaian sumber daya, peningkatan standar keselamatan, dan adopsi teknologi untuk mendukung kerja jarak jauh. Dalam kaitan ini maka kebijakan untuk mendukung peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja perlu dilakukan oleh negara-negara maju untuk meningkatkan produktivitas. Pergeseran sektor utama menuju sektor jasa pada negara maju memberikan peluang bagi negara berkembang, terutama negara Asia, sebagai tujuan relokasi industri manufaktur dari negara maju. Hal ini merupakan langkah efisiensi produksi untuk lebih dekat pada pasar utama, selain untuk mendapatkan biaya faktor produksi yang lebih rendah.

Prospek perbaikan ekonomi global tersebut serta dampak positif reformasi struktural pada gilirannya terus mendorong penguatan perekonomian Indonesia dalam jangka menengah. Dari sisi global, pemulihan ekonomi global mampu mendorong aktivitas perdagangan dunia sehingga menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kinerja ekspor melalui peningkatan kerja sama pada negara mitra dagang utama dan diversifikasi ekspor pada pasar nontradisional. Dari sisi domestik, reformasi struktural memberikan dampak positif pada peningkatan produktivitas Indonesia. Bonus demografi yang saat ini masih menjadi keunggulan Indonesia perlu dimanfaatkan guna mendukung peningkatan produktivitas. Berdasarkan faktor di atas, prospek perekonomian Indonesia diprakirakan meningkat dalam kisaran 5,5-6,1% pada 2025. Prospek pertumbuhan ekonomi jangka menengah akan diikuti dengan kenaikan pendapatan per kapita. Berdasarkan asesmen Bank Dunia terkini, GNI per kapita Indonesia tahun 2019 naik menjadi 4.050 dolar AS dari posisi sebelumnya 3.850 dolar AS. Peningkatan ini menaikkan peringkat Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas (*upper middle income*). Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah panjang akan terus menguat dan mampu menjadikan Indonesia menjadi negara maju berpendapatan tinggi pada 2045.

Sejalan dengan perbaikan struktur ekonomi, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dalam jangka menengah diprakirakan dalam tren membaik didukung defisit transaksi berjalan yang tetap terjaga. Defisit transaksi berjalan diprakirakan terjaga pada kisaran 1,5-2,5% dalam jangka menengah, ditopang oleh transformasi ekonomi pada sektor-sektor prioritas melalui upaya mendorong ekspor dan mengurangi ketergantungan impor. Perbaikan defisit transaksi berjalan didorong oleh daya saing yang meningkat, reformasi struktural yang berlanjut, dan pemanfaatan infrastruktur. Pertumbuhan industri pengolahan berorientasi

ekspor dan industri substitusi impor diprakirakan akan dapat meningkatkan surplus neraca perdagangan nonmigas. Surplus neraca perdagangan nonmigas yang meningkat tersebut diprakirakan dapat mengompensasi defisit neraca migas yang diprakirakan terus naik seiring dengan kenaikan konsumsi domestik di tengah penurunan *lifting* migas. Defisit neraca jasa terus mengalami penurunan seiring dengan perbaikan kinerja pelayaran domestik dan peningkatan pertumbuhan industri pariwisata. Sementara itu, peningkatan aliran investasi langsung akan mendorong defisit pendapatan primer semakin meningkat. Surplus pendapatan sekunder diprakirakan terus meningkat sejalan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

NPI yang membaik dalam jangka menengah ditopang surplus transaksi modal dan finansial yang diprakirakan terus berlanjut. Reformasi struktural, peningkatan ketersediaan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi meningkatkan aliran modal masuk asing, baik berupa investasi langsung maupun portofolio. Aliran investasi langsung menjadi penopang peningkatan kinerja transaksi modal dan finansial. Investasi langsung dalam jangka menengah menunjukkan tren peningkatan seiring UU Cipta Kerja yang telah disahkan. UU Cipta kerja akan memperbaiki iklim investasi dan menarik investasi asing masuk ke Indonesia. Penyederhanaan perizinan berusaha dan kemudahan perizinan menjadi daya tarik investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Sementara itu, aliran investasi portofolio meningkat sejalan dengan kebijakan moneter ekspansif di negara maju, perbaikan kondisi pasar keuangan global, dan prospek ekonomi Indonesia yang semakin baik serta imbal hasil investasi yang tetap menarik. Kemudian aliran investasi lainnya diprakirakan cukup besar, yang didukung oleh akselerasi rencana proyek infrastruktur yang menyebabkan kebutuhan pendanaan infrastruktur meningkat.

Inflasi dalam jangka menengah diprakirakan tetap berada pada kisaran sasaran inflasi, didukung oleh peningkatan efisiensi dan produktivitas perekonomian. Inflasi diprakirakan akan tetap rendah dan stabil pada kisaran sasaran. Hal ini sejalan dengan konsistensi kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan harga dan penguatan koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah. Di samping itu, pengaruh nilai tukar terhadap inflasi relatif rendah. Inflasi inti diprakirakan tetap terjaga, didukung oleh perbaikan di sisi penawaran seiring kapasitas produksi yang lebih kuat. Perbaikan distribusi barang dan jasa melalui ketersediaan infrastruktur konektivitas juga akan berdampak positif pada peningkatan efisiensi transportasi dan logistik. Inflasi *volatile food (VF)* tetap terkendali didukung upaya Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan. Potensi tekanan pada inflasi VF diprakirakan minim mengingat harga komoditas global yang diprakirakan stabil dalam jangka menengah. Inflasi *administered prices* (AP) diprakirakan tetap terkendali. Kebijakan Pemerintah, harga komoditas global, dan harga minyak menjadi faktor utama dalam pergerakan inflasi AP dalam jangka menengah.

Prakiraan pencapaian inflasi tersebut disertai dengan disparitas inflasi antarwilayah dan antarwaktu yang mengecil. Terdapat lima faktor yang dapat memengaruhi penurunan disparitas. Pertama, pasokan yang lebih baik seiring produktivitas sektor ekonomi yang semakin meningkat. Kedua, konektivitas antarwilayah yang semakin membaik. Ketiga, kualitas infrastruktur yang meningkat. Keempat, manajemen pola tanam dan impor yang membaik. Perbaikan pengelolaan pola tanam dan impor merupakan perbaikan struktural yang mampu meminimalkan tekanan inflasi VF. Kelima, pemanfaatan ekonomi digital dalam menekan disparitas. *Platform* digital mampu meningkatkan transparansi harga antarwilayah, sehingga dapat meminimalisasi asimetris informasi. Di samping itu, penggunaan *platform* digital dalam aktivitas ekonomi turut menjaga laju inflasi pada level yang rendah dan stabil melalui peningkatan efisiensi.

4.5.

Kebijakan Struktural Kunci Prospek Jangka Menengah

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kebijakan struktural akan menjadi kunci mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menjadi negara maju. Dalam konteks ini, rangkaian kebijakan reformasi struktural diperlukan untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan, dengan stabilitas yang terjaga. Kebijakan reformasi struktural diarahkan untuk menciptakan sumber baru pertumbuhan, meningkatkan nilai tambah produksi dan integrasi antarsektor dan antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan yang inklusif. Kebijakan pengembangan rantai pasokan domestik dengan optimalisasi integrasi antarkawasan dibutuhkan untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor dan konsumsi yang tinggi sehingga akselerasi pertumbuhan ekonomi domestik dapat dilakukan tanpa menimbulkan tekanan eksternal. Selain itu, kebijakan pembangunan infrastruktur untuk mengembangkan konektivitas industri dan pariwisata juga perlu terus diperkuat untuk menurunkan biaya logistik, meningkatkan daya saing, serta pemerataan ekonomi. Perbaikan iklim bisnis dan investasi melalui penyederhanaan regulasi dan birokrasi, seperti implementasi UU Cipta Kerja, juga dibutuhkan untuk mendorong investasi dan menambah sumber pembiayaan pembangunan. Strategi pengembangan ekonomi dan keuangan digital nasional juga perlu dilakukan untuk memperkuat digitalisasi sistem pembayaran. Hal itu pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan menambah jumlah pelaku ekonomi yang berpartisipasi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Kebijakan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan untuk mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi (Gambar 4.6).

Searah dengan kebijakan struktural ini, pengembangan rantai pasokan domestik, baik pada sektor industri, perdagangan, dan jasa keuangan perlu diperkuat guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Peningkatan integrasi rantai pasokan domestik, baik dalam rangka penyediaan bahan baku kegiatan produksi, maupun dalam mendukung kegiatan perdagangan dan jasa keuangan, akan meningkatkan nilai tambah perekonomian selain untuk menjaga ketahanan eksternal. Strategi rantai pasokan yang diimplementasikan dengan baik, yang didukung oleh kesiapan berbagai pihak dan berbagai daerah dalam memberikan kontribusi, akan mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap impor sehingga dapat menjaga ketahanan eksternal. Dukungan dari berbagai pihak dan daerah tersebut perlu diiringi oleh penguatan peran industri manufaktur dan jasa serta mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap sumber daya alam. Pada sisi lain, peningkatan

Gambar 4.6. Kebijakan Struktural dalam Mencapai Indonesia Maju

Sumber: Bank Indonesia

peran pelaku domestik dalam rantai pasokan akan mendorong tumbuhnya aktivitas perekonomian dan meningkatkan nilai tambah, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terakselerasi. Dengan struktur perekonomian yang semakin baik tersebut, pertumbuhan ekonomi akan semakin kuat dan berkelanjutan, serta berada dalam lintasan menuju negara berpendapatan tinggi pada 2045.

Penguatan sektor manufaktur terus ditempuh melalui *two-pronged approach*, yakni meningkatkan peran industri manufaktur untuk menopang kinerja ekspor dan meningkatkan nilai tambah. Strategi kebijakan transformasi manufaktur ini dilakukan secara *end-to-end*, karena dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan inklusif. Penguatan industri manufaktur dilakukan dengan mengatasi kendala utama secara menyeluruh, baik dari sisi faktor produksi, faktor pendukung iklim usaha, maupun faktor akses pasar. Strategi pengembangan juga perlu dilakukan secara terintegrasi untuk memastikan bahwa industri yang terpusat di Jawa semakin terintegrasi dengan industri pendukung di luar Jawa, sehingga ketergantungan terhadap impor bahan baku dapat semakin menurun. Upaya peningkatan nilai tambah turut mendukung integrasi antarsektor dan antarwilayah, sehingga spesifikasi produk industri pendukung domestik di luar Jawa sesuai dengan kebutuhan industri di Jawa. Selain itu, strategi pengembangan juga harus bersifat inklusif, yakni berdampak luas ke seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, pengembangan klaster UMKM serta pengembangan inovasi melalui pembangunan pusat teknologi dan inovasi sebagai *public goods* yang hasilnya dapat dirasakan secara luas dan bersifat inklusif, menjadi penting dalam strategi transformasi manufaktur ini.

Berbagai contoh menunjukkan peran penting integrasi dalam mendukung penguatan sektor industri manufaktur. Pada industri logam, terdapat pengembangan kawasan industri terintegrasi *Indonesia Morowali Industrial Park* (IMIP). Morowali dipilih sebagai lokasi kawasan industri karena sumber daya alam nikel tersedia di kabupaten Morowali, untuk selanjutnya nikel diproses menjadi produk turunan dan diekspor. Seluruh proses, termasuk ekspor-impor dilakukan di dalam lingkungan IMIP. Mulai dikembangkan sejak 2014, IMIP kini menjadi kawasan industri dengan rantai produksi baja terlengkap di dunia. Saat ini, terdapat lima industri logam yang beroperasi di IMIP dengan pangsa ekspor mencapai 54% dari total ekspor besi baja nasional. Secara keseluruhan, IMIP berkontribusi terhadap perekonomian nasional dan perekonomian daerah, baik melalui ekspor maupun penyerapan tenaga kerja, termasuk melalui pendirian politeknik untuk menjamin pasokan tenaga kerja berkeahlian sesuai kebutuhan.

Berbagai kebijakan struktural juga didukung penguatan pembangunan infrastruktur yang diarahkan untuk menopang konektivitas industri dan pariwisata, sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah. Penguatan infrastruktur akan meningkatkan produktivitas melalui penurunan biaya logistik dan mendorong aktivitas ekonomi pada daerah-daerah di Indonesia. Infrastruktur yang terhubung dengan baik, terutama pada sektor industri maupun pariwisata, akan memberikan dampak besar pada peningkatan daya saing perekonomian melalui penurunan biaya logistik, yang kemudian dapat meningkatkan produktivitas. Peran penting pembangunan infrastruktur juga diharapkan mendorong pemerataan ekonomi melalui penguatan konektivitas nasional yang mampu menunjang potensi pertumbuhan daerah. Peningkatan produktivitas yang diiringi oleh terbukanya potensi pertumbuhan daerah akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah yang semakin luas.

Sejalan dengan pembangunan infrastruktur, penguatan infrastruktur fisik dasar akan dilanjutkan. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan pembangkit listrik dapat menekan biaya logistik dan meningkatkan konektivitas antarwilayah, sedangkan pengembangan infrastruktur untuk mengoptimalkan teknologi digital dapat mendukung konektivitas digital melalui peningkatan adopsi teknologi informasi. Peningkatan ketersediaan infrastruktur membutuhkan peran bersama Pemerintah dan swasta dalam pembangunannya, yang didukung oleh strategi pembiayaan yang inovatif melalui pendalaman pasar keuangan untuk menarik minat investor. Sinergi antara Pemerintah dan otoritas terkait perlu dilanjutkan untuk mendorong peran pasar keuangan sebagai sumber pembiayaan infrastruktur, termasuk dengan memperluas

alternatif pembiayaan infrastruktur bagi penerbit sekaligus mendorong peningkatan minat investor dalam berinvestasi dengan pilihan produk yang beragam melalui penerbitan *green bonds*. Pandemi Covid-19 memberikan tantangan bagi pembiayaan infrastruktur oleh sektor publik akibat anggaran yang semakin terbatas, sehingga peran swasta perlu semakin didorong, terutama peningkatan peran institusi domestik sebagai investor, khususnya untuk pembiayaan jangka panjang.

Kebijakan struktural juga terkait dengan pengembangan iklim bisnis dan investasi yang lebih baik, antara lain melalui penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Penyederhanaan regulasi dan birokrasi, yang diiringi dengan perbaikan tata kelola dapat mempercepat proses perizinan dan memberikan kepastian keberlangsungan usaha, yang menjadi faktor penarik bagi masuknya investor. Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk mencapai negara berpendapatan tinggi perlu didukung oleh pembiayaan yang cukup melalui masuknya investasi. Stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan yang dimiliki oleh Indonesia, bersama dengan perbaikan regulasi dan birokrasi akan menjadi determinan utama bagi peningkatan investasi di masa depan. Masuknya investasi baru selain dapat meningkatkan kapasitas produksi domestik, juga mampu meningkatkan peluang masuknya inovasi baru dalam pasar melalui transfer teknologi dan meningkatkan produktivitas. Perbaikan iklim bisnis dan investasi pada seluruh daerah, selain mampu meningkatkan kapasitas produksi daerah, juga mampu memperluas cakupan peningkatan produktivitas hingga ke banyak daerah, sehingga dapat meningkatkan produktivitas agregat.

Penyederhanaan regulasi dan birokrasi dapat memaksimalkan potensi bonus demografi pada perekonomian Indonesia. Bonus demografi yang dimiliki Indonesia memberikan keuntungan pada sisi penawaran melalui tingginya jumlah penduduk usia produktif yang meningkatkan potensi jumlah tenaga kerja. Untuk memaksimalkan potensi bonus demografi tersebut, penyerapan tenaga kerja memainkan peranan penting. Peningkatan jumlah investasi masuk yang diiringi oleh kesiapan tenaga kerja atas kebutuhan industri merupakan faktor penting bagi terserapnya tenaga kerja dan berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Terjadinya relokasi produksi pada beberapa produsen global menuju negara berkembang yang saat ini terjadi perlu direspons dengan perbaikan iklim bisnis dan investasi domestik, sehingga meningkatkan peluang Indonesia sebagai basis produksi baru.

Digitalisasi pembayaran untuk efisiensi transaksi dan inklusi ekonomi juga perlu diperkuat dengan strategi ekonomi dan keuangan digital nasional. Perubahan besar yang dibawa oleh arus digitalisasi berpeluang mendukung inklusi ekonomi dan keuangan serta memperkuat stabilitas. Teknologi digital mengurangi biaya dan memperluas jangkauan transaksi sehingga dapat mendorong kegiatan perekonomian. Inovasi digital juga mengubah interaksi sosial dan meningkatkan efisiensi karena tambahan kemampuan agen ekonomi dalam mengakses dan memanfaatkan informasi. Inovasi digital juga memungkinkan lahirnya model bisnis, industri, dan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Interkonektivitas agen ekonomi tersebut dapat memotong rantai distribusi barang dan jasa, mendorong sebaran informasi secara lebih merata, dan menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih efisien. Inovasi teknologi juga memungkinkan sistem keuangan terdesentralisasi sehingga lebih stabil akibat ketergantungan sistemik pada satu atau sedikit pihak berkurang. Berbagai peluang itu yang ditopang oleh desain strategi ekonomi dan keuangan digital nasional dapat mendorong penduduk dewasa

unbanked dan UMKM ke dalam sektor ekonomi dan keuangan formal (inklusi keuangan). Program inklusi keuangan perlu diperluas dari kepemilikan atas alat pembayaran ataupun rekening bank menjadi akses pasar keuangan dan pasar barang serta berkesinambungan (inklusi ekonomi). Dengan demikian, inovasi digital dapat menjadi solusi pemerataan pembangunan dan memperkuat efisiensi dan produktivitas.

Upaya menata ekosistem digital perlu dilakukan dengan memastikan ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur keras (*hard infrastructure*) berupa ketersediaan infrastruktur sistem keuangan, khususnya sistem pembayaran, diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha di era digital. Infrastruktur publik untuk pembayaran dan data perlu dibangun untuk menjamin keterhubungan seluruh agen ekonom melalui *platform* digital. Sementara itu, penguatan infrastruktur lunak (*soft infrastructure*) diarahkan untuk mendukung upaya pembentukan iklim regulasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan digital. Penataan infrastruktur lunak dilakukan melalui penguatan kerangka regulasi, mekanisme *entry policy*, dan pengawasan. Pengembangan regulasi dan *entry policy* disederhanakan dan lebih adaptif guna mengantisipasi inovasi teknologi keuangan yang cepat. Struktur pengaturan disusun untuk menata kembali ekosistem sistem pembayaran sehingga menjadi fondasi bagi perizinan, pengawasan, pelaporan, dan penyelenggaraan sistem pembayaran yang mendukung inklusi ekonomi dan keuangan. Pemanfaatan data pembayaran akan meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan. Data pembayaran QRIS yang tersimpan dalam infrastruktur data yang aman dan tersedia bagi publik dapat dimanfaatkan bagi kepentingan *merchant*, seperti pencatatan, akuntansi, dan *inventory management*. Data pembayaran dapat diolah untuk memberikan gambaran kelayakan finansial (*creditworthiness*) UMKM dan masyarakat *unbanked,* sehingga membantu mengatasi hambatan dalam mengakses berbagai layanan keuangan, seperti lokasi yang jauh dan pembukuan yang tidak tersedia.

Reformasi struktural melalui implementasi UU Cipta Kerja dan penguatan infrastruktur akan meningkatkan produktivitas Indonesia. UU Cipta Kerja yang disahkan pada 2020 merupakan salah satu instrumen untuk penyederhanaan dan peningkatan efektivitas birokrasi. Dengan implementasi *Omnibus Law*, sekitar 80 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 pasal telah direvisi sekaligus hanya dengan UU Cipta Kerja yang mengatur multisektor. UU Cipta Kerja bermanfaat untuk memperbaiki iklim investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menyederhanakan perizinan berusaha. Terobosan ini dalam jangka menengah dapat memperbaiki *Ease of Doing Business* (EODB) Indonesia dari peringkat 73 pada tahun 2020 menuju peringkat 40 pada tahun 2024 sebagaimana yang ditargetkan dalam RPJMN 2020-2024. Sementara itu, peningkatan produktivitas juga dapat dicapai melalui penguatan infrastruktur dasar, seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan pembangkit listrik. Penguatan itu akan menekan biaya logistik dan meningkatkan konektivitas antarwilayah. Pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur tersebut dapat ditopang oleh pasar keuangan yang makin dalam. Berbagai skema pembiayaan inovatif terus dikembangkan dan disempurnakan melalui perluasan basis investor pada pasar keuangan untuk mengurangi dampak gejolak eksternal terhadap perekonomian Indonesia.

Kebijakan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia juga berkontribusi dalam peningkatan produktivitas. Perbaikan kualitas sumber daya manusia dapat berkontribusi dengan meningkatkan ketersediaan tenaga kerja berkeahlian tinggi (*skilled labor*). Rata-rata lama sekolah diprakirakan terus meningkat secara gradual sejalan upaya Pemerintah yang konsisten mendorong perbaikan pendidikan. Pemerintah juga melakukan pengembangan pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui program yang dilaksanakan secara inklusif di seluruh wilayah Indonesia, mencakup daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T). Pemerintah juga mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program-program tersebut. Selain itu, Pemerintah berkolaborasi dengan industri/swasta memberikan program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan, antara lain melalui implementasi Program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja tersebut diprakirakan terus berlanjut dalam jangka menengah untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kerja berkeahlian dan mendorong perbaikan produktivitas.